KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Presiden Apresiasi PDI-P
Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Presiden Apresiasi PDI-P

Pujian Presiden Prabowo dinilai sebagai sebuah langkah politik untuk menunjukkan pemerintahannya tetap ingin terlihat demokratis, terbuka, dan tidak alergi terhadap kontrol politik.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang konsisten tetap berada di luar pemerintahan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu disebut telah berjasa terhadap demokrasi Indonesia karena telah menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan. Dalam negara demokrasi, pemerintah tetap membutuhkan pengawas dan kontrol dari partai penyeimbang.

Apresiasi itu disampaikan Presiden Prabowo di penguhung pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (20/5/20226). Selama kurang lebih 2 jam, Presiden menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Presiden menyampaikan, dari delapan partai politik (parpol) di parlemen, tujuh parpol berada dalam barisan koalisi pemerintahannya. Hanya satu parpol parlemen, yakni PDI-P, yang berada di luar pemerintahan, menjadi partai penyeimbang.

Mantan Menteri Pertahanan itu menghormati keputusan PDI-P tersebut. "Sekali lagi terima kasih atas kerja sama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah dan saya hormati, dan saya hargai itu," tuturnya.

Presiden bahkan menyebut PDI-P telah berjasa bagi demokrasi. Sebab, dalam negara demokrasi dibutuhkan partai yang menjalankan fungsi pengawasan, sehingga mekanisme *checks and balances* tetap berjalan.

"Demokrasi kita perlu *checks and balances*. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDI-P berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," ujarnya.

Meski mengapresiasi sikap PDI-P itu, Prabowo sempat berharap agar partai berlambang banteng itu dapat bergabung dengan koalisinya dan mendukung pemerintahannya.

"Memang, maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara," kata Presiden.

Presiden juga bercerita, kritikan tajam dari kader PDI-P terhadap berbagai program dan kebijakannya kerap membuatnya sulit tidur dan menganggu suasana hatinya. Namun, kritikan itu harus dipandang sebagai sinyal pengingatan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya saat ini.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga melontarkan candaan dengan menyinggung bahwa pihak yang dekat dengan PDI-P justru ikut memenangi tender pemerintahan. Pernyataan itu lantas memicu sorakan dan gelak tawa peserta sidang.

"Kalau di pemerintah, kan, banyak fasilitas, tetapi menteri-menteri selalu tanya saya minta petunjuk, 'Pak, ini bagaimana, ada proyek ada tender, tetapi di belakangnya PDI-P'," lanjut Prabowo.

Namun, Presiden menekankan dan meminta para menterinya agar tidak mempersoalkan latar belakang politik dari para pihak pemenang proyek pemerintah, termasuk yang berafiliasi dengan PDI-P. Sikap profesional itu merupakan cerminan dari prinsip yang pernah ia terima langsung dari Presiden ke-5 RI dan juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Saya mau terbuka, saya enggak berkenaan waktu itu alias luntang-lantunglah, Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan, Saudara-saudara," tuturnya.

Sejalan

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, menyebut, yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan marwah PDI-P, yakni bersikap kritis dalam konsep *checks and balances*. Menurut dia, PDI-P tetap mendukung program pemerintah dengan cara yang benar, yakni sesuai dengan konstitusi, ideologi, dan berpihak kepada rakyat.

Menurut Aria, Prabowo menyadari arti penting menjaga marwah reformasi melalui keberadaan partai politik atau fraksi di DPR yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi kritik dan dukungan terhadap pemerintah.

"Tapi, hal yang lebih penting lagi adalah menjadi suatu tradisi demokrasi kita," lanjutnya.

Secara terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai, meski Prabowo dikenal berhubungan baik dengan Megawati dan PDI-P, pujian Prabowo itu bisa dibilang sebagai strategi untuk mengelola resisi. Tujuannya agar PDI-P tidak selalu berhadap-hadapan dengan pemerintahan saat ini dan juga tidak dipersepsikan untuk menjinakkan oposisi.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat pidato Prabowo ini bukan sekadar memuji PDI-P, melainkan juga bentuk pengakuan bahwa pemerintah membutuhkan legitimasi demokrasi. Hal ini karena memang harus diakui, ketika hampir semua partai masuk kabinet, publik mulai khawatir demokrasi kehilangan penyeimbangnya.

Pecahkan tradisi

Perihal kehadiran Presiden dalam Rapat Paripurna DPR untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro RAPBN memecahkan tradisi lama sistem ketatanegaraan Indonesia. Prosedur pada tahun-tahun sebelumnya selalu menempatkan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah untuk membacakan penggantar dokumen anggaran awal tersebut. Pidato presiden terkait keuangan negara biasanya juga hanya disampaikan saat sidang paripurna yang mengagendakan nota keuangan setiap menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, 17 Agustus.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden menghadiri Rapat Paripurna DPR karena bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

"Kebetulan tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," ujarnya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, secara hukum tidak ada ketentuan yang melarang seorang kepala negara untuk menyampaikan dokumen anggaran negara secara langsung ke parlemen. Hal ini karena para menteri kabinet pada dasarnya bekerja untuk menjalankan tugas serta mewakili kepentingan presiden.

Dasco menambahkan bahwa prosedur ini diperbolehkan dan menjadi momen pertama kalinya seorang presiden memaparkan langsung KEM-PPKF. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali, ya," ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjadi salah satu kandidat di Pemilihan Presiden 2024, Anies Baswedan, mengingatkan pemerintah terkait kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Melalui akun media sosialnya, Anies menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang jatuh, harga bahan kebutuhan pokok yang meningkat, daya beli rumah tangga yang melemah, dan kesempatan kerja yang menyempit.

Melihat persoalan itu, Anies berharap pemerintah bisa terbuka dan transparan. Sebab, menurut dia, yang dibutuhkan publik kepastian arah Indonesia ke depan.

(BOW/DVT/NIA/RTG/SYA)